

## Analisis Perkembangan Kurikulum Pembelajaran PPKn SD: Implementasi Kurikulum 1984-Kurikulum Merdeka

**Faradia Syahfitri<sup>1\*</sup>, Dita Safira Firdaus<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Universitas Negeri Malang, Indonesia  
Email: faradias112@gmail.com

<sup>2</sup> Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Universitas Negeri Malang, Indonesia  
Email: ditafira67@gmail.com



©2024 – JETCLC ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisesnsi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### Info Articles

#### History Articles:

Submitted : 08-12-2023

Revised : 27-01-2024

Accepted : 30-01-2024

Published : 31-01-2024

#### Keyword:

Kurikulum; PPKn;  
Sekolah Dasar.

### ABSTRACT.

*This research aims to analyze the development of the education curriculum in Indonesia, specifically focusing on the curriculum evolution in civic education (PPKn) from the implementation of the 1984 Curriculum to the implementation of the Merdeka Curriculum. In this study, the literature review method is employed by collecting various references relevant to the topic, which will serve as the data to be processed and analyzed. The data selection process is conducted through the peer review technique of articles based on specific criteria. The research findings indicate that the nomenclature of PPKn has undergone several changes corresponding to the shifts in the educational curriculum. The content discussed has also evolved over time, with the Merdeka Curriculum emerging as a suitable solution to address the shortcomings of the previous curricula and meet the needs of an increasingly complex era.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya perkembangan kurikulum dalam pembelajaran PPKn dari penerapan Kurikulum 1984 hingga penerapan Kurikulum Merdeka. Dalam penelitian ini, digunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai macam referensi yang sesuai topik bahasan dan dapat dijadikan sebagai data yang akan diolah dan dianalisis. Proses seleksi data dilakukan dengan teknik peer review artikel sesuai kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nomenklatur PPKn terjadi beberapa kali sesuai dengan pergantian kurikulum pembelajaran. Materi yang dibahas juga telah berkembang dari masa ke masa dan khususnya kurikulum merdeka belajar menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan kurikulum sebelumnya dan memenuhi kebutuhan zaman yang semakin kompleks.*

Address Correspondence

Email: faradias112@gmail.com

e-ISSN: 2774 – 8405

## **PENDAHULUAN**

Kurikulum pendidikan di Indonesia berkembang dengan dinamis. Kurikulum merupakan seperangkat rencana untuk mencapai tujuan pembelajaran mengenai tujuan, bahan, isi, serta cara membelajarkan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran (Raharjo, 2020). Kurikulum merupakan salah satu komponen penyangga proses pembelajaran, baik dan buruknya hasil pendidikan dan ketercapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan kurikulum. Di Indonesia perubahan kurikulum dialami sejak kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 1945, perubahan kurikulum terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, kurikulum 2013, dan yang terbaru adalah Kurikulum Merdeka Belajar. Pergantian kurikulum berpengaruh terhadap nomenklatur dan kebijakan pada setiap mata pelajaran yang disajikan.

Pembelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PPKn bertujuan memberi bekal siswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan berkenaan dengan bela negara, hubungan antar negara, serta menjadi warga negara yang baik (Magdalena dkk., 2020). Pembelajaran PPKn di SD bertujuan untuk membantu siswa dalam pembentukan karakter bangsa untuk membentuk warga Indonesia seutuhnya dan diharapkan mengarah pada penempatan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, UUD, dan norma-norma di masyarakat melalui penciptaan masyarakat yang berkarakter.

Dalam perkembangannya, PPKn mengalami beberapa kali perubahan istilah untuk memperbaiki tujuan dan isi dari PPKn. Awalnya Pendidikan Kewarganegaraan muncul dalam Kurikulum Rentjana Pelajaran 1947 dengan istilah *Civics* atau Kewarganegaraan sebagai bagian dari mata pelajaran Tata Negara. Nomenklatur mata pelajaran PPKn berubah sejalan dengan pergantian Kurikulum pendidikan. Pada Kurikulum 1968 disebut dengan "Pendidikan Kewargaan Negara". Pada Kurikulum 1975 dikenal dengan PMP yang diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Raharjo, 2020). Pada tahun 1994, dikenal dengan sebutan PPKn. Pada tahun 2004, terintegrasi dengan IPS menjadi PKPS. Pada kurikulum 2006 KTSP menjadi PPKn. Pada K13, mata pelajaran PPKn berubah kembali menjadi PPKn. Pada Kurikulum

Merdeka, nilai-nilai Pancasila disematkan dalam setiap kegiatan pembelajaran terlebih lagi pada pembelajaran PPKn.

Pergantian kurikulum menarik untuk dianalisis terutama pada pembelajaran PPKn di SD. Pembelajaran PPKn yang memiliki dampak yang signifikan baik dari nomenklatur dan kebijakan pada muatan pelajaran. Oleh karena itu, pada ruang lingkup PPKn, peneliti tertarik untuk melakukan analisis perkembangan kurikulum SD di Indonesia, khususnya dalam pembelajaran PPKn dari penerapan Kurikulum 1984 hingga Kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan pembuatan artikel ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perkembangan kurikulum pada pembelajaran PPKn di SD dari perubahan nomenklatur, kebijakan serta materi yang terdapat pada setiap mata pelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum yang digunakan, serta kelebihan dan kekurangan kurikulum dalam implementasi pembelajaran PPKn.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library study*) atau metode penelitian dengan mengumpulkan referensi-referensi yang sesuai dengan bahasan dan dijadikan sebagai data yang diolah dan dianalisis, melalui kriteria literatur dengan memilah artikel/jurnal, buku, dan sumber lainnya. Kriteria dari sumber yang digunakan adalah artikel terbitan 2018–2023 tahun terakhir, artikel perkembangan kurikulum, dan artikel perkembangan mata pelajaran PPKn di Sekolah Dasar. Melalui proses seleksi data dengan teknik *review (peer review)* artikel dibuat sesuai kriteria literatur. Proses dilanjutkan dengan analisis data, seleksi artikel, menganalisis artikel sesuai kriteria, serta menganalisis atau mengkaji isi artikel. Penelitian dengan metode studi pustaka dilakukan untuk mendapat informasi dari teknik penelitian yang diharapkan, sehingga yang diperoleh bukan duplikasi namun berupa analisis melalui memilah berbagai sumber referensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Data yang diperoleh merupakan hasil dari kajian pustaka dari artikel/jurnal yang telah dilakukan *literature review* mengenai kurikulum pembelajaran pada tahun 1984 yaitu Kurikulum 1984 hingga Kurikulum Merdeka. Hasil dari analisis tersaji pada tabel 3.1

**Tabel 3.1** Hasil Analisis Kurikulum Pembelajaran PPKn SD

No.	Kurikulum	Nomenklatur PPKn	Materi PPKn di SD
1.	Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang disempurnakan)	PMP (Pendidikan Moral Pancasila)	UUD 1945, lembaga negara, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, badan peradilan, hak asasi manusia, asas dan makna keadilan, dan kajian terhadap Pancasila.
2.	Kurikulum 1994	PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)	Pancasila dalam P4, mencakup nilai, moral dan norma serta nilai-nilai spiritual dan perilaku yang diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara.
3.	Kurikulum 2004 “KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)”	PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial). Terintegrasi dengan pelajaran IPS	Pancasila, persatuan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, HAM, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, kebutuhan warga negara, dan globalisasi.
4.	Kurikulum 2006 “KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)”	PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)	Persatuan dan kesatuan bangsa, norma-norma sosial, perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, konstitusi negara, hak asasi manusia, dinamika kekuasaan politik, dasar negara Pancasila, dan fenomena globalisasi.
5.	Kurikulum 2013	PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)	Nilai moral Pancasila yang terkandung dalam lambang negara, semangat kebersamaan dalam keberagaman, jenis dan tujuan norma dalam masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa, pemahaman mengenai hak dan kewajiban, makna simbol Pancasila, makna keberagaman, dan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
6.	Kurikulum 2020 (Kurikulum Merdeka Belajar)	Pendidikan Pancasila	Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika

Hasil dari penelitian *literature review* disajikan dalam bentuk tabel dengan perbedaan dari nomenklatur dan materi mata pelajaran PPKn di SD pada setiap kurikulum pembelajaran. Hasil menunjukkan bahwa nomenklatur PPKn terjadi beberapa kali sesuai dengan pergantian kurikulum pembelajaran. Materi yang dibahas juga telah berkembang dari masa ke masa dan khususnya kurikulum merdeka belajar menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan kurikulum sebelumnya dan memenuhi kebutuhan zaman yang semakin kompleks.

## Pembahasan

### a. Kurikulum 1984 (Kurikulum 1975 yang disempurnakan)

Kurikulum 1975 disempurnakan dengan kurikulum 1984. Pada Kurikulum 1984, penamaan PPKn tetap dengan nomenklatur kurikulum 1975 yaitu PMP (Pendidikan Moral Pancasila). PMP adalah mata pelajaran wajib siswa di segala tingkat pendidikan dan dasar pembentukan landasan ideologis dan moral bangsa pada masa Orde Baru. Materi dalam PMP bertujuan untuk menanamkan ideologi Pancasila

(Darmadi, 2020). Kurikulum 1984 diharapkan mampu memperbaiki sistem pendidikan yang mencakup ketiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik (Widiatmaka, 2022). Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, menggunakan model CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) di mana siswa memiliki posisi sebagai subjek dalam pembelajaran (Wardhana, 2021). Pembelajaran PMP memuat materi aspek pengetahuan seperti kajian terhadap Pancasila dan UUD 1945, HAM, asas dan makna keadilan, kemerdekaan Indonesia, kerjasama internasional, lembaga-lembaga negara, dan badan peradilan.

Keunggulan kurikulum 1984 terkait pembelajaran PPKn yaitu mengutamakan pendekatan proses, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, kualitas siswa tinggi dalam intelektual maupun sosial, menanamkan ideologi Pancasila, menciptakan masyarakat yang taat dan patuh terhadap norma dan nilai Pancasila. Kelemahan Kurikulum 1984 dalam Pembelajaran PPKn adalah pembelajaran lebih menekankan ranah kognitif belum menekan ranah afektif dan psikomotorik, tujuan PMP belum tercapai, dan materi PMP tumpang tindih dengan pelajaran lainnya seperti pelajaran IPS dan sejarah nasional (Widiatmaka, 2022).

#### **b. Kurikulum 1994**

Kurikulum 1994 diberlakukan setelah munculnya Surat Keputusan Mendikbud No.060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar. Perubahan kurikulum mempengaruhi perubahan istilah pelajaran PMP menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan Pancasila memiliki konotasi lebih luas dengan tidak hanya memiliki dimensi moral, namun juga konsep, nilai, moral, dan norma (Widiatmaka, 2023). Pada penerapan Kurikulum 1994, kegiatan pembelajaran di SD terbagi menjadi tiga catur wulan untuk tiap tahun ajarannya. Materi yang disajikan pada tingkatan SD cukup kompleks dan padat. Materi dalam pelajaran PPKn mencakup nilai, moral, norma serta nilai-nilai spiritual bangsa Indonesia, dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1999 ditambahkan suplemen materi PPKn sesuai dengan perubahan kehidupan ketatanegaraan setelah era reformasi.

Kelebihan dari Kurikulum 1994 pada muatan pelajaran PPKn adalah fokus pembelajaran untuk mengembangkan karakter serta membentuk nilai-nilai kebangsaan, memperluas kajian PMP dengan aspek konsep, nilai, moral, dan norma sesuai dengan Pancasila, serta memperkuat identitas siswa yang berjiwa nasionalis. Berjiwa nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai bangsa (Azsahra, 2022). Kekurangannya yaitu metode pembelajaran dominan hanya ceramah, kurang terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya, serta menekan pada mata pelajaran yang padat karena sistem catur wulan (Madani & Kurnia, 2023).

#### **c. Kurikulum 2004 “KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)”**

Kurikulum 1994 digantikan dengan Kurikulum 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pada jenjang SD, pembelajaran PPKn

diintegrasikan secara tematik dengan mata pelajaran IPS menjadi PKPS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial). Materi mata pelajaran PKPS meliputi Pancasila, kebutuhan warga negara, kekuasaan dan politik, konstitusi negara, persatuan dan kesatuan bangsa, hak asasi manusia, norma, hukum, dan peraturan, dan globalisasi (Kusumawardani & Iswan, 2021). Materi pokok kelas rendah yaitu berfokus pada identitas diri, keluarga, dan masyarakat, hidup rukun, hak dan kewajiban, kedudukan dan peran, serta aturan. Pada kelas tinggi berfokus pada keragaman, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, penerapan Pancasila, HAM, proklamasi, dan globalisasi.

Kelebihan dari Kurikulum 2004 pada muatan pelajaran PKPS yaitu memungkinkan siswa mempelajari kompetensi pada pembelajaran PPKn dan IPS yang berkaitan, adanya pemusatan materi pada tema dan konsep yang jelas, banyak kolaborasi dalam pemecahan masalah, meningkatkan keterampilan sosial siswa, serta bagi guru menghemat waktu dan efisien karena PKPS perpaduan dari PPKn dan IPS. Kelemahan dari Kurikulum 2004 pada muatan pelajaran PKPS yaitu membutuhkan kemampuan pedagogi yang baik dari guru untuk menyajikan materi integrasi dari PPKn dan IPS, serta terdapat keterkaitan antara PPKn dan IPS yang tidak bisa selalu dikaitkan dan berujung cenderung dipaksakan.

#### **d. Kurikulum 2006 “KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)”**

Munculnya kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum. Pada tahun 2004 diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan KBK dimana PPKn berubah menjadi Kewarganegaraan. Tetapi pada tahun 2006 namanya mengalami perubahan kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Meskipun dari segi isi tidak mengalami perubahan, namun pengembangan kurikulum diserahkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan. Dalam kurikulum ini PKn awalnya diintegrasikan dengan pelajaran IPS, tidak lagi diintegrasikan dan berdiri sendiri menjadi mata pelajaran PKn. Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup materi PKn dalam kurikulum KTSP ini meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma-norma sosial, perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, konstitusi negara, hak asasi manusia, dinamika kekuasaan politik, dasar negara Pancasila, dan fenomena globalisasi.

Kelebihan dari kurikulum ini adalah mendorong untuk meningkatkan kreativitas guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah dalam melaksanakan program pendidikan karena kurikulum yang dikembangkan kini menjadi tanggung jawab langsung sekolah. Hal ini memungkinkan setiap sekolah menyesuaikan dan menitikberatkan pada materi tertentu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan kelemahan dari kurikulum ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menguraikan atau menjabarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di berbagai lembaga pendidikan, serta masih banyaknya guru yang belum sepenuhnya memahami konsep, penyusunan, dan implementasi KTSP di lapangan (Fajri dkk., 2020).

#### **e. Kurikulum 2013**

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebabkan perubahan kurikulum dari kurikulum. Perubahan yang terjadi pada kurikulum ini berdampak pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sebutan Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN kemudian berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang lebih akrab dikenal dengan PPKn. Penyempurnaan pembelajaran PKN menjadi PPKn secara isi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) terasa lebih menonjol dalam aspek ketatanegaraan dan moral Pancasila dirasa kurang mendapat perhatian, pembelajaran pada ranah keterampilan (psikomotorik) dirasa belum dikembangkan secara optimal, cenderung hanya mengutamakan ranah sikap (afektif) dan ranah pengetahuan (Prastowo, 2018). PPKn dikembangkan untuk mencapai kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan (Rachman dkk., 2021).

Materi PPKn dalam kurikulum ini mencakup beberapa aspek, seperti nilai moral Pancasila yang terkandung dalam lambang negara, semangat kebersamaan dalam keberagaman, jenis dan tujuan norma dalam masyarakat, persatuan dan kesatuan bangsa, pemahaman mengenai hak dan kewajiban, makna simbol Pancasila, makna keberagaman, dan nilai-nilai moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dalam kurikulum 2013 ini adalah pada kurikulum ini menggunakan pendekatan tematik yang memungkinkan integrasi materi PPKn dengan mata pelajaran lain, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan lainnya. Dengan adanya

pendekatan ini, membuat pembelajaran lebih kontekstual atau relevan karena siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai aspek pembelajaran. Selain menjadi kelebihan pendekatan tematik juga menjadi kelemahan dalam kurikulum ini karena sulit untuk diimplementasikan di kelas. Semua mata pelajaran yang dilarutkan menjadi satu membuat pembelajaran menjadi tidak fokus.

#### **f. Kurikulum 2020 (Kurikulum Merdeka Belajar)**

Adanya kurikulum 2020 atau kurikulum merdeka belajar, didasari dengan adanya Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti. Perubahan kurikulum ini berdampak pada sebutan PPKn menjadi Pendidikan Pancasila. Namun muatan pendidikan kewarganegaraan tidak hilang, tetapi diintegrasikan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila (Putra, 2022). Hanya nomenklatur yang berubah, muatan kurikulumnya masih tetap dan diintegrasikan di dalamnya. Akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila merupakan tiga poin utama dalam gagasan merdeka belajar pada kurikulum ini. Kemendikbud menetapkan enam elemen profil pelajar Pancasila, antara lain (1) bernalar kritis, (2) kemandirian, (3) kreatif, (4) gotong royong, (5) kebhinekaan global, dan (6) berakhlak mulia (Raharjo, 2020). Dengan adanya penambahan profil pelajar pancasila ini diharapkan mampu meningkatkan karakter peserta didik terhadap hasil pembelajaran (Madani & Kurnia, 2023). Secara keseluruhan untuk materi ruang lingkup PPKn pada kurikulum ini yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Kelebihan kurikulum merdeka belajar untuk PPKn adalah dengan adanya program penguatan profil pelajar pancasila dalam kurikulum ini membuktikan bahwa kurikulum merdeka belajar menjadikan Pancasila sebagai inti pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan kelemahannya adalah kurangnya persiapan guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Hal ini karena materi PPKn sangat luas dan dalam kurikulum merdeka belajar ini mengharuskan pembelajaran yang bersifat interaktif.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Perkembangan kurikulum PPKn mengalami proses perubahan dan perkembangan yang signifikan sepanjang waktu. Dimulai pada tahun 1984 dari PMP diganti dengan sebutan PPKn,

tahun 2004 dari PPKn diganti dengan sebutan PKKS (Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial), tahun 2006 diganti menjadi PKn (Pendidikan Kewarganegaraan), dan pada tahun 2013 mengalami perubahan kembali menjadi PPKn. Adanya perubahan kurikulum PPKn di Indonesia mengacu pada kebutuhan peserta didik dan perubahan tersebut merupakan langkah penting guna pendidikan yang diselenggarakan tetap sesuai dengan tuntutan zaman. Kurikulum Merdeka Belajar menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan kurikulum sebelumnya dan memenuhi kebutuhan zaman yang semakin kompleks.

### Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, sebagai seorang akademisi di bidang PPKn sudah sewajarnya untuk memperkuat semangat dan respon terhadap perkembangan kurikulum PPKn ini. Oleh karena itu, penulis memberikan saran khususnya kepada para akademisi bidang PPKn agar tetap mengikuti perkembangan terkini dalam kurikulum di Indonesia. Seperti yang telah dipaparkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, hal ini mengakibatkan semua mata pelajaran terkena dampak dari adanya perubahan tersebut, tidak terkecuali mata pelajaran PPKn.

### DAFTAR RUJUKAN

Azsahra, S. F. (2022). Implementasi Nilai- Nilai Pendidikan Karakter di SMP Negeri 2 Barombong. *JETCLC: Journal of Educational Technology, Curriculum, Learning, and Communication*, 2(2), 43–48.

Darmadi, H. (2020). *Apa Mengapa Bagaimana Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. An1mage.

Fajri, S., Kurnia Ilahi, R., Rahmi Yunita, R., Arniman, K., & Yuliani, D. (2020). The national curriculum in development in the reform period. *Proceedings of the International Conference Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang - ICFTKUIINBP 2020*, 33–36.

Kusumawardani, S., & Iswan. (2021). *Modul Konsep Dasar PPKn di SD*. UMJ Press.

Madani, J. E., & Kurnia, H. (2023). Analisis Implikasi Perubahan Kurikulum Terhadap Pembelajaran PPKn Pada Sekolah Jenjang SD. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*,

3(1), 31–39.  
<https://doi.org/10.47200/aossagcj.v3i1.1846>

Magdalena, I., Haq, A. S., & Ramdhan, F. (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. *Bintang*, 2(3), 418–430.

Prastowo, A. (2018). Perubahan Kurikulum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SD/MI Di Indonesia: Dari Ktsp Menuju Kurikulum 2013. *Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar*, 8(1), 36–52.

Putra. (2022, Februari 17). *Tak Ada PPKn Lagi di Kurikulum Merdeka Mulai Tahun Ajaran Baru 2022/2023*. Medcom.id. <https://www.medcom.id/pendidikan/new-s-pendidikan/5b2GeEak-tak-ada-ppkn-lagi-di-kurikulum-merdeka-mulai-tahun-ajaran-baru-2022-2023>

Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>

Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.20961/pknp.v15i1.44901>

Wardhana, I. P. (2021). Review Kurikulum Pendidikan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) Tahun 1984 dalam Pendidikan Indonesia. *Keraton: Journal of History Education and Culture*, 3(1), 17.

Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10.

Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Membangun Warga Negara yang Baik dan Mengantisipasi Krisis Karakter Pemuda. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 7–18. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3041>